



**PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MEMBANGUN
INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR
DI KELURAHAN 20 ILIR D II
KECAMATAN KEMUNING
KOTA PALEMBANG
DI SUSUN OLEH :**

**NAMA : PRASATYA RAIHAN AKBAR
NIM : 21.11.151
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
(STIA) SATYA NEGARA PALEMBANG
TAHUN 2025**

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the village head leadership in building basic service infrastructure in 20 Ilir Village D-II of Kemuning District Palembang City and to determine the inhibiting factors for the role of the village head leadership in building basic service infrastructure in 20 Ilir Village D-II of Kemuning District Palembang City. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. Meanwhile, the data analysis used is an analysis consisting of three flow of activities that occur simultaneously, namely: data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification. Based on the results of the research, it is known that the Village Head of

Keywords: Role, Leadership of village head, Basic Service Infrastructure

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran seorang lurah atau seorang pemimpin tentunya sangat penting karena menjadi penghubung langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Lurah tidak menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan peran sosial sebagai pemimpin yang harus memahami kondisi warganya dan mampu

menyerap aspirasi masyarakat. Iadituntut untuk mengordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan, memfasilitasi pembangunan fisik dan nonfisik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.yang ada, termasuk dalam menjaga ketertiban lingkungan, meningkatkan pelayanan publik, dan menggerakkan potensi sumber daya lokal.

Secara hukum,tugas dan kewenangan lurah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan,



yang menyatakan dalam Pasal (6) ayat (3) bahwa: “Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” (PP No. 17 Tahun 2018: Pasal 6).

Lurah sering di hadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan lurah yang memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik agar dapat menjalankan

peran dan tanggung jawab secara optimal. Dengan posisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, peran lurah sangat menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan di tingkat kelurahan.

Dalam menjalankan tugasnya, lurah juga harus mampu membina hubungan yang harmonis dengan tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, serta pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan di wilayah kelurahan. Efektivitas kerja seorang lurah sangat mempengaruhi keberhasilan program – program tanggung jawab yang di harapkan dari seseorang berdasarkan posisi atau jabatannya dalam suatu organisasi, masyarakat, atau struktur organisasi sosial tertentu, dalam konteks kepemimpinan, peran mengacu pada fungsi – fungsi yang di jalankan oleh seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kepemimpinan merupakan elemen penting dalam suatu organisasi atau kelompok, karena

pemimpin memiliki

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur perkotaan akan memerlukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur yang membuat kehidupan kota lebih nyaman, seperti pembangunan jaringan pipa gas kota, fasilitas pengolahan dan pengelolaan limbah, pipa air minum dan sanitasi, serta perluasan angkutan massal.

Pembangunan infrastruktur ke depan juga akan mengutamakan pelaku penting dalam modal sosial budaya, kesetaraan gender, ketahanan bencana, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan hal ini bahwa kegiatan pembangunan Infrastruktur tentu saja dibutuhkan adanya suatu kerjasama dari segala pihak. Partisipasi masyarakat adalah modal yang utama dalam pelaksanaan bidang pembangunan yang efektif karena dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis partisipasi berperan sebagai suatu alat peningkatan pemberdayaan masyarakat yang cerdas dan aktif terhadap kondisi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Palembang No. 24 Tahun

2010 mengatur tentang tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas kelurahan. Perwali ini dibuat untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan antara lain :

1. Melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, ketertiban umum dan ketenteraman,



- pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik.
3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data ketertiban umum serta meminta bantuan kepada camat.
 4. Membina ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
 5. Melayani masyarakat di bidang ketertiban dan kesejahteraan umum.
 6. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut, keberhasilan tidak terlepas dari peran lurah dalam membimbing, mengarahkan dan menggerakkan bawahan serta masyarakatnya kearah tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini Penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan peran Lurah 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning kota Palembang didalam menjalankan tugasnya khususnya dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar .

Perangkat kelurahan beserta masyarakat agar mampu mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan prinsip demokrasi, dengan menumbuhkan prakasa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelangsungan pembangunan yang baik, maka perlu keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk memberdayakan dan menggerakkan bentuk-bentuk partisipasi bagi masyarakat di Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning kota Palembang bukan hal yang mudah, hal ini tergantung juga dari pemimpin sedangkan lurah

merupakan pimpinan pemerintahan pada tingkat yang rendah dari sistem pemerintah indonesia yang berfungsi dan bertanggung jawab terutama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, pentingnya kepemimpinan lurah khususnya dalam menunjang keberhasilan pola pembangunan Infrastuktur pelayanan dasar di kelurahan yang lebih mengoptimalkan daya dan potensi masyarakat maka lurah harus berusaha untuk mampu memperbaiki dan mempunyai strategi agar pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di Kelurahan 20 Ilir D II dapat berhasil. Dengan ini berarti tinggi rendahnya tingkat pembangunan infrastruktur kelurahan mempunyai hubungan yang erat dengan eksistensi Lurah baik ditinjau dari sudut kepemimpinannya, kharisma dan kemampuannya maupun kecakapan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar kelurahan, Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa lurah memiliki peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar di kelurahan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat peran kepemimpinan lurah dalam upaya membangun infrastruktur pelayanan dasar di kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang, hal ini menjadi masalah yang menarik untuk dibahas, sebab infrastruktur pelayanan dasar adalah fasilitas dan struktur dasar yang



dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di kelurahan ini, menurut pengamatan peneliti untuk infrastruktur yang belum maksimal yang ada di kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning ini yaitu masih adanya jalan yang berlubang, lampu jalan yang sering dalam keadaan mati sehingga pengendara motor dan mobil ketika melewati jalan pada malam hari kurang mendapatkan penerangan yang cukup di wilayah ini, masih kurangnya pengadaan pompa air di beberapa wilayah sekitar kelurahan dan penyumbatan gorong-gorong akibat sampah yang menumpuk sehingga terkadang menghambat mengalirnya air, hal tersebut merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting yang harus ada dan terjaga di dalam suatu lingkungan sehingga jika tidak maksimal di jaga dan dipelihara dapat menghambat kualitas hidup masyarakat, seperti tidak terbukanya akses ke layanan dasar lainnya, dan tidak mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang di peroleh peneliti bahwa lurah di 20 Ilir D II kurang komunikasi terhadap pelaksanaan pemerintah dan permasalahan lurah tidak cepat dalam merespon dan lurah sulit mengatasi permasalahan banjir dan sering menghadapi kendala dana yang terbatas, adapun permasalahan yang terjadi di pembangunan infrastruktur yang perlu pembenahan seperti jalan, sanitasi, lampu jalan, jembatan, Misalnya, beberapa jalan yang masih mengalami kondisi rusak dan tidak layak, saluran sanitasi yang tersumbat oleh sampah yang tidak berfungsi optimal, kerusakan lampu

jalan akibat rusak dan tidak terawat, kondisi jembatan rusak dan tidak terawat, Adapun Permasalahan yang peneliti tuliskan sebelumnya terjadi bahwa masih banyak masyarakat yang belum maksimal merasakan manfaat infrastruktur pelayanan dasar dan terkadang masih sulit dalam mengakses pelayanan dasar karena ini merupakan kebutuhan dasar dan tidak dapat terlepas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur dapat berupa fasilitas fisik maupun sosial. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut maka penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang berjudul **"Peran Kepemimpinan Lurah**

dalam Membangun Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning kota Palembang"

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di peroleh rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah peran kepemimpinan Lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning kota Palembang ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepemimpinan lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di kelurahan 20



Iilir D II kecamatan kemuning kota Palembang.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Penelitian mengenai peran kepemimpinan Lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di Kelurahan 20 Iilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang antara lain :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian tentang peran kepemimpinan Lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di Kelurahan 20 Iilir D II Kecamatan Kemuning

2. Bagi Kantor Lurah 20 Iilir D II Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan peran kepemimpinan Lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di kantor lurah 20 Iilir D II Kecamatan Kemuning dan bersinergi dengan wilayah sekitarnya.

3. Bagi STIA Satya Negara sebagai referensi bahan kajian serta bahan perbandingan bagi dosen dan mahasiswa STIA Satya Negara Palembang yang membutuhkannya di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

Peran Kepemimpinan

Peran adalah serangkaian tindakan yang diharapkan ditunjukkan oleh orang-orang dalam posisi tertentu dalam masyarakat. Definisi lain dari peran adalah gagasan fungsional yang menggambarkan fungsi atau tugas seseorang berdasarkan tugas yang sebenarnya mereka selesaikan.

Menurut Merton Rho (2007:67), peran adalah pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari seseorang dalam posisi tertentu untuk menunjukkannya agar kehidupannya lebih teratur.

Peran, menurut David Berry (2003:105), adalah serangkaian harapan yang diberikan kepada orang-orang yang memegang posisi sosial tertentu. Harapan-harapan ini, menurut David Berry, merupakan penyeimbang standar sosial. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa peran ditetapkan oleh norma-norma sosial, yang menyiratkan bahwa seorang individu harus melaksanakan tugas-tugas yang diharapkan masyarakat dari mereka dalam pekerjaan dan kegiatan lainnya.

Penulis menggunakan istilah "peran" untuk merujuk pada perilaku, sikap, atau posisi seseorang yang mereka miliki karena kepercayaan orang lain. Bagi orang-orang yang telah mempercayai mereka, fungsi ini akan mengarah pada perkembangan yang bermanfaat.

Menurut (Soekanto, Soejono, Sulistyowati, & Budi, (2017:211) tentang fungsi penting berikut yang secara alami dimainkan oleh manusia dalam masyarakat:

- a. Untuk menjaga ketertiban sosial, peran-peran tertentu harus dipenuhi.
- b. Dalam kerangka sosial masyarakat, peran dipandang sebagai tindakan fundamental.
- c. Dalam kerangka sosial masyarakat, peran dianggap sebagai tindakan esensial.
- d. Terkadang ada orang-orang dalam masyarakat yang gagal melaksanakan tanggung jawab



yang diberikan; tugas-tugas ini memerlukan kepatuhan.

- e. Jika setiap orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya dan berusaha.
- f. Belum tentu masyarakat akan dapat memberikan harapan yang seimbang. Sering Terlihat masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Pengertian Kepemimpinan

Karena seorang pemimpin adalah seseorang yang menjalankan kepemimpinan, dan kepemimpinan adalah sesuatu yang harus diwujudkan dalam pekerjaan atau perilaku, pemimpin dan kepemimpinan saling berkaitan. "Pemimpin" sering disebut dengan istilah-istilah Indonesia seperti penghulu, pemimpin, pelapor, pembina, pantun, usaha, gerakan, ketua, kepala, dan pemandu. Seseorang dengan kualitas kepemimpinan dan kemampuan untuk membujuk individu atau sekelompok individu tanpa meminta pembenaran adalah seorang pemimpin.

Dahulu, kepemimpinan seorang pemimpin dikatakan sebagai kualitas psikologis intrinsik yang hanya dimiliki olehnya dan tidak dimiliki orang lain.

Akibatnya, mereka disebut sebagai pemimpin sejak lahir. Akibatnya, orang lain tidak dapat meniru sifat kepemimpinan mereka dan tidak diperlukan instruksi.

Kemampuan untuk membujuk orang atau bawahan agar bekerja sama demi mencapai tujuan terbukti dari definisi yang diberikan di atas. Karena Tuhan akan meminta

pertanggungjawaban pemimpin atas kepemimpinannya, menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dipenuhi, dan harus dilakukan dengan benar. Lebih lanjut, dari sudut pandang bahasa Inggris, istilah "pemimpin" berarti "pemimpin", yang bertanggung jawab untuk membimbing orang lain. Istilah "memimpin" memiliki arti sebagai berikut:

- a. *Loyalty*, seorang pemimpin harus membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan.
- b. *Educate*, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya.
- c. *Advise*, seorang pemimpin mampu memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada.
- d. *Discipline*, seorang pemimpin mampu memberikan kedeladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.

Gagasan Uhar Suhasaputra (2016:74) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses menyatukan individu-individu dalam suatu kelompok agar mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan pemberian inspirasi, dorongan, dorongan, atau pengelolaan terhadap tindakan orang lain. Bergantung pada bagaimana setiap pemimpin memimpin kesuksesan organisasi, kepemimpinan membantu organisasi tersebut berkembang.

Peran Kepemimpinan

Hadari Nawawi (2012:75) menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki beberapa fungsi, antara



lain:

1. Kepemimpinan direktif: Jenis komunikasi ini bersifat satu arah, dengan pemimpin membujuk pengikut untuk patuh dan bergantung pada mereka.
2. Kepemimpinan konsultatif: Dalam pendekatan ini, pemimpin dan pengikut berkomunikasi dua arah, tetapi pengikut tetap bergantung pada penilaian pemimpin.
1. 3. Kepemimpinan partisipatif: Kepemimpinan ini melibatkan pembangunan hubungan interpersonal yang kuat antara pemimpin dan pengikutnya.
2. 4. Kepemimpinan yang mengendalikan: Peran ini melibatkan komunikasi satu arah dan memberi pemimpin wewenang untuk mengarahkan pengikut sesuai dengan instruksi mereka.

Menurut Sutrisno (2014: 219) ada 3 bentuk peran kepemimpinan yakni yang bersifat interpersonal, informasional dan pengambilan keputusan dalam menjalankan manajemen yaitu :

1. Peran interpersonal: Posisi pemimpin sebagai penghubung dan kapasitasnya untuk mengendalikan perilakunya sendiri dalam situasi sosial.
2. Peran informasional: Seorang pemimpin dalam posisi ini dapat memantau bagaimana informasi bergerak di dalam perusahaan.
3. Peran informasional: Pemimpin memberikan informasi berharga kepada stafnya tentang tujuan perusahaan.
3. Ada tiga jenis pekerjaan pengambil keputusan.

- a. Entrepreneur, pemimpin mampu mengkaji segala situasi yang dihadapi oleh organisasi dan berusaha mencari peluang serta solusi
- b. Peredam gangguan mengambil keputusan apabila organisasi mengalami gangguan yang harus segera ditangani.
- c. Pembagi sumber dana dan daya, wewenang dan kekuasaan dibagi menjadi rata berdasarkan kedudukan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang berada di sebuah organisasi.

Sedangkan menurut Kartono (2005) kepemimpinan memiliki peran sebagai penuntun, pembimbing, pengarah, dan pembangun motivasi-motivasi kerja, mengendalikan sebuah organisasi, membangun jaringan komunikasi yang baik, dan memberikan pengawasan kepada bawahan sesuai dengan tujuan yang ingin direalisasikan.

Dalam penelitian jurnal yang berjudul Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Kecamatan Gandus Kota Palembang. Jurnal Volume 1 Nomor 2 Edisi Maret 2019 Oleh Amir Mahmud, peran serta fungsi kepemimpinan adalah menertibkan beberapa masalah terkait dengan ketepatan waktu, kesesuaian dan ketapan dalam pegawai untuk menjalankan tugas tugasnya di kantor, karena disini pemimpin dijadikan sebagai penggerak, pemberi keputusan, dan pemberi informasi yang jelas terhadap para pegawainya

Dengan begitu dapat disimpulkan peran dari kepemimpinan adalah mengendalikan, mempengaruhi,



mengawasi setiap hal yang akan dilakukan di dalam sebuah organisasi dengan tujuan utama mewujudkan visi misi yang sebelumnya sudah ditetapkan.

Karakteristik Kepemimpinan

Menurut Hakiem (2003), seorang pemimpin perlu memiliki empat kualitas fundamental atau prasyarat:

- 1) Pemimpin perlu peka terhadap lingkungan sekitarnya dan memiliki kemampuan untuk mendengar apa yang dikatakan orang lain serta menerima rekomendasi mereka. Karena alasan ini, pemimpin dianggap memiliki kapasitas mendengarkan yang lebih baik. Kemampuan ini memungkinkan pemimpin untuk menyerap dan menyaring aspirasi bawahannya sebagai saran atau kritik atas tindakan yang telah direncanakan atau dilaksanakan sebelumnya.
- 2) Pemimpin harus memberikan teladan bagi orang lain di sekitarnya. Pemimpin memberi contoh bagi anggota stafnya dengan mencontohkan perilaku, sikap, dan bahkan pola bicara yang tepat.
- 3) Pemimpin perlu menepati janji dan komitmennya terhadap perusahaan.

Untuk mengelola organisasi secara efektif, seorang pemimpin perlu memiliki visi dan misi yang jelas. Sebagai pendukung dan pelaksana, pemimpin harus terus bekerja sama dengan stafnya untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

- 4) Kemampuan mengambil keputusan, kecerdasan, dan

keberanian diperlukan bagi para pemimpin. Seorang pemimpin yang kompeten adalah seseorang yang mengambil keputusan dengan tegas demi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Begitulah seharusnya seorang pemimpin; mereka tidak boleh gegabah maupun tidak menentu. Pemimpin diharapkan cakap, telah memikirkan masa depan ketika mengambil keputusan, dan bersedia bertanggung jawab atas setiap masalah yang mungkin muncul.

Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin menggunakan wewenangnya untuk menjalankan perusahaan atau organisasi dengan caranya sendiri, tanpa mempekerjakan stafnya sebagai bawahan, demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini adalah beberapa teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Zainal dkk., 2017:36:

- 1) Kepemimpinan otoriter adalah jenis kepemimpinan di mana pemimpin dipandang sebagai otoritas tertinggi. Sebagai penguasa tunggal, pemimpin akan dapat mengklaim dirinya ahli dalam segala hal, sehingga keterampilan bawahannya akan diingat.
- 2) Gaya kepemimpinan kendali bebas adalah gaya kepemimpinan dimana Pemimpin akan selalu memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya dalam mengambil keputusan dan melakukan kegiatan menurut kehendak dan kepentingan masing-masing. Pemimpin hanya memfungsikan sebagai penasihat bagaimana keputusan itu akan



diambil.

- 1) Gaya kepemimpinan demokratis: Aktif, dinamis, dan terfokus, para pemimpin senantiasa berupaya mengenali inisiatif dan daya cipta staf mereka. Musyawarah selalu diutamakan dalam pengambilan keputusan dengan gaya kepemimpinan ini. Karena seorang pemimpin yang efektif harus mampu menerapkan dan membedakan gaya kepemimpinan secara efektif dalam skenario spesifik yang berada di bawah kendalinya, gaya kepemimpinan yang digunakan seorang pemimpin akan bergantung pada situasi yang dihadapi. Selain itu, menurut Hasibuan (2009: 172–173), filosofi kepemimpinan berikut dapat diterapkan: Gaya kepemimpinan partisipatif, bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan persuasif ini pemimpin memberikan dorongan kepada pegawainya untuk ikut andil menciptakan kondisi kerja yang serasi dengan partisipasi pegawai tersebut. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja sama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan. Pemimpin sebagai pimpinan bawahan yang akan tetap menerima partisipasi saran dan ide namun tetap dalam pertimbangan sedangkan keputusan mutlak ada tetap ditangan pemimpin.
- 2) Gaya kepemimpinan delegatif. kepemimpinan ini terjadi ketika

pemimpin melimpahkan atau mendelegasikan kekuasaannya kepada seorang bawahannya. sedangkan untuk pengambilan keputusan juga dilimpahkan kepada anggotanya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan pada bawahan. Pemimpin tidak mau tahu bagaimana cara bawahan mengerjakannya yang penting pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan keinginan pemimpin dalam kata lain pemimpin terima jadi urusan dalam organisasi atau perusahaan karena pendelegasian tersebut.

Gaya kepemimpinan situasional.

Peran Kepemimpinan Lurah

Secara teoritis, para pemimpin di birokrasi publik dan swasta memikul tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, para pemimpin memainkan peran krusial dalam upaya mencapai tujuan suatu wilayah, yang menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan. Menurut Sinambela dalam Pasolong (2012), tingkat kompetensi seorang pemimpin pada dasarnya tidak berpengaruh pada kewajibannya untuk melayani masyarakat sebaik mungkin, karena berusaha melayani publik dengan baik merupakan salah satu hal yang membantu para pemimpin mencapai tujuan mereka seefektif mungkin. Memotivasi bawahan merupakan salah satu cara bagi para pemimpin untuk meningkatkan pelayanan publik.



Motivasi kerja yang tinggi maupun rendah

Pemimpin di lembaga publik maupun swasta secara teoritis bertanggung jawab atas banyak hal. Oleh karena itu, pemimpin sangat penting untuk mencapai tujuan suatu bidang, membuktikan bahwa kepemimpinan memiliki dampak besar pada keberhasilan atau kegagalan. Karena keinginan untuk melayani publik dengan baik merupakan salah satu hal yang membantu para pemimpin mencapai tujuan mereka seefektif mungkin, Sinambela dalam Pasolong (2012) berpendapat bahwa tingkat kompetensi seorang pemimpin pada dasarnya tidak berpengaruh pada komitmen mereka untuk melayani publik sebaik mungkin. Salah satu cara yang dapat dilakukan para pemimpin untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan menginspirasi bawahan mereka. Motivasi kerja yang tinggi atau rendah

- 1) Perencanaan merupakan komponen penting dari semua kegiatan, termasuk perencanaan pengelolaan limbah. Para pemimpin birokrasi menggunakan perencanaan sebagai alat untuk menentukan arah birokrasi.
- 2) Menetapkan situasi, yaitu gagasan yang mengendalikan struktur organisasi, menugaskan anggota pada posisi yang tepat, dan menerapkan pendekatan kepemimpinan yang tepat kepada bawahan.
- 3) Supervisi merupakan tugas penting yang melibatkan pemantauan pekerjaan anggota atau pekerja dengan menetapkan standar, mengevaluasi hasil sesuai

dengan standar tersebut, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

- 4) Evaluasi, merupakan fungsi kepemimpinan yang memantau hasil implementasi kinerja pegawai untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. Temuan evaluasi kemudian akan digunakan sebagai panduan untuk peningkatan kinerja, jika diperlukan, guna mengatasi tantangan dalam pelayanan publik.

Pemimpin juga memiliki tanggung jawab dalam peran kepemimpinannya atas berbagai aspek fungsi kepegawaian, mulai dari rekrutmen dan pelatihan hingga mengapa pekerja atau pejabat tidak efektif dalam menjalankannya. Kepemimpinan yang diterapkan harus mampu memastikan bahwa semua pejabat dibimbing oleh pencapaian tujuan yang efektif dan efisien dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kepemimpinan seseorang juga menuntut perhatian yang serius dan bahkan pemberian insentif tambahan untuk kinerja yang memuaskan. Pasolong (2012) menjelaskan peran kepemimpinan sebagai berikut:

4. Peran Antar Pribadi

Menjadi figur pemimpin yang dihormati merupakan peran interpersonal seorang pemimpin birokrasi. Pemimpin perlu bertindak secara moral dan tepat, termasuk memiliki etos kerja yang disiplin dan pandangan positif. Mengingat pemimpin birokrasi memiliki pengetahuan penting, terutama mengenai birokrasi yang mereka awasi, peran informasional mereka sangatlah signifikan. Seorang



pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat agar dapat menyampaikan informasi dengan sukses. Menjelaskan rencana, kebijakan, dan ekspektasi pekerjaan kepada bawahan, beserta instruksi tentang bagaimana pekerjaan seharusnya dilakukan, tugas untuk anggota tim atau bawahan, tujuan kinerja, dan menyetujui rencana aksi untuk mencapainya, semuanya merupakan bagian dari fungsi informatif. Menurut Hamalik (2001), seorang pemimpin menjalankan

fungsi kepemimpinan berikut:

Tugas, dan Fungsi Kepemimpinan

Tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah melaksanakan tugas-tugas manajemen, yang juga dikenal sebagai fungsi manajerial, yang meliputi pengorganisasian, motivasi, pengawasan, dan perencanaan. Pemimpin harus menginspirasi orang-orang di bawah arahnya untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Seorang pemimpin harus mampu memengaruhi orang lain untuk mendapatkan kerja sama dan dukungan mereka agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Lebih spesifik lagi, tanggung jawab seorang pemimpin meliputi pengambilan keputusan, penetapan tujuan, perencanaan, penempatan dan koordinasi staf, koordinasi vertikal (antara atasan dan bawahan) dan horizontal (antara departemen atau unit), serta pengawasan dan pengarahan pelaksanaan tugas. Secara umum, tanggung jawab utama seorang pemimpin meliputi:

1. Antara lain melaksanakan fungsi manajemen, yaitu suatu kegiatan pokok yang meliputi pelaksanaan,
2. Penyusunan rencana
3. Penyusunan organisasi, pengarahan organisasi, pengendalian dan penilaian
4. Pelaporan Mendorong (memotivasi) bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun
5. Membina bawahan agar dapat meikul tanggung jawab tugas masing masing
6. Membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien
7. Menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis
8. Menyusun fungsi manajemen secara benar dan baik
9. Menjadi penggerak yang baik dan menjadi sumberkreatifitas

Menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihakluar Sedangkan fungsi pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga tidak dapat dibantah merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki 2 aspek yaitu sebaga berikut:

1. Fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya.
2. Fungsi sebagai *top management*, yaitu mengadakan *planning, organizing, staffing, directing, commanding*, dan *controlling*.



Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan adalah fasilitas fisik yang mencakup jaringan jalan dan fasilitas pendukungnya. Infrastruktur jalan dirancang untuk memfasilitasi transportasi darat yang mudah, termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan untuk memperlancar pergerakan orang dan distribusi barang. Jalan dapat meningkatkan akses seseorang terhadap kontak sosial, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan, menurut Amartya Sen (Indarti, 2018).

Membangun, meningkatkan, mengelola, atau memelihara infrastruktur untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat disebut sebagai penyediaan infrastruktur. Infrastruktur jalan memfasilitasi transportasi dan menghubungkan berbagai wilayah.

Perekonomian lokal diuntungkan ketika individu dapat bepergian dengan lebih cepat, efisien, dan nyaman ke tempat kerja, sekolah, atau layanan kesehatan. Hal ini memudahkan pengangkutan produk perdagangan, pertanian, dan perikanan ke pasar.

a. Infrastruktur Jembatan

Infrastruktur jembatan adalah struktur fisik yang dirancang dan dibangun untuk menghubungkan dua titik yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, jurang, rel kereta api, atau medan lainnya, sehingga memungkinkan kendaraan, pejalan kaki, atau transportasi lainnya untuk melintas dengan aman dan lancar. Manfaat infrastruktur jembatan antara lain meningkatkan

konektivitas yang menghubungkan wilayah yang sebelumnya terpisah, memudahkan akses antarwilayah, mempercepat mobilitas dan transportasi, serta memperlancar pergerakan orang, barang, dan jasa dalam waktu yang lebih singkat (Rosadi, dkk., 2019).

Tanpa adanya jembatan, akan menyebabkan terputusnya konektivitas antarwilayah, seperti wilayah yang dipisahkan oleh sungai, jurang, atau rel kereta api yang sulit atau bahkan mustahil dijangkau dengan mudah.

b. Infrastruktur Air Bersih

Infrastruktur air bersih adalah sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingga harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Untuk

mengalokasikan air bersih secara efektif, kita harus memperhatikan karakteristik air yang mudah berubah bentuk, menguap, meresap dan mengalir melalui media tertentu. Kegunaan air terbagi menjadi tiga sektor utama, yaitu kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian dan industri.

Kebutuhan rumah tangga akan air terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan maupun dipedesaan. Air untuk keperluan irigasi pertanian juga terus meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus bertambah. Sama halnya dengan sektor industri, yang mengalami perkembangan karena struktur perekonomian yang mengarah pada industrialisasi. Tingkat kebutuhan air bersih di



Indonesia masih terus meningkat dari tahun ke tahun (Rahayuningtias, 2014).

Namun peningkatan infrastruktur air cukup sulit di kembangkan di tengah masyarakat dengan pendapatan yang cukup rendah, dikarenakan mereka akan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok atau dasar untuk terus bertahan hidup, dibandingkan dengan mendapatkan air bersih yang di anggap masih belum cukup penting. Padahal akses terhadap air bersih yang memadai dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan produktivitas mereka dalam pekerjaan dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga meningkatkan pendapatan mereka atau meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

c. **Infrastruktur sanitasi**

Infrastruktur sanitasi adalah paya dan sistem untuk menjangak kebersihan lingkungan dengan cara mengelola air limbah serta sampah agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.

Ketersediaan infrastruktur sanitasi yang memadai memiliki dampak besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. adapun manfaat infrastruktur sanitasi seperti mencegah penyebaran penyakit seperti diare, kolerak, tifus, dan cacangan dan menurunkan angka kematian bayi dan anak akibat penyakit yang di tularkan melalui air atau lingkungan kotor.

Lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara dari limbah domestik serta menjaga kebersihan sungai dan sumber air bersih. Jika tidak di jaga atau di bersihkan bisa mengakibatkan menjadi tempat berkembangnya biak bakteri, virus dan parasit dan bisa mencemari lingkungan sekitar (Rahayuningtias, 2014).

E. **Infrastruktur lampu jalan**

Infrastruktur lampu jalan adalah sistem atau jaringan fisik yang di rancang dan di bangun untuk menyediakan pencahayaan di area jalan umum, seperti jalan raya, jalan lingkungan, trotoar, dan area publik lainnya, guna mendukung keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pengguna jalan pada malam hari atau dalam kondisi pencahayaan minim.

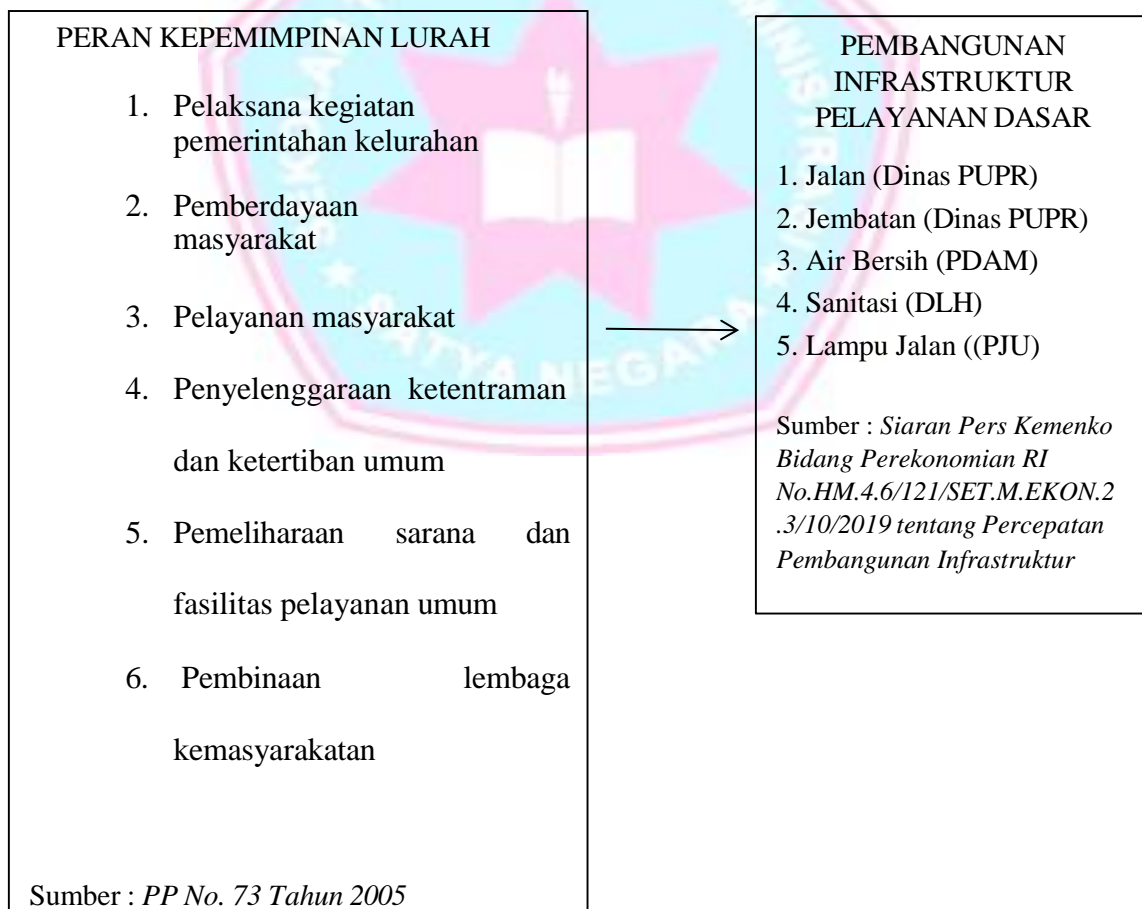
Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peranan Kepemimpinan lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di Kantor lurah 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang. dikarenakan dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan di Kelurahan 20 Ilir D II belum memadai, masih ada sebahagian jalan yang masih rusak apalagi di penghujung akhir tahun 2024 ini sudah mulai memasuki musim penghujan sehingga beberapa akses jalan rusak dan berlubang, adalah sangat penting dan meningkatkan seluruh aspek infrastruktur pelayanan dasar untuk kehidupan masyarakat.



Sekaligus merupakan proses pengembangan pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara. Pencapaian dari penelitian ini menunjukkan peranan kepemimpinan lurah dalam pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan agar lebih optimal, hal ini dapat dilihat pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.

Gambar 1
Kerangka Berpikir





BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu rangkaian langkah-langkah yang secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau

mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Suryabrata, 2011). Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu (Siyoto, 2015). Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif, Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan Fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Setiawan, 2018).

Deskriptif kualitatif yaitu salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam

jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam

masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Peneliti Menggunakan jenis Pendekatan deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan atau mendeskripsikan Peranan Kepemimpinan Lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di Kantor Lurah 20 Ilir DII Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Infrastruktur Pelayanan Dasar

Infrastruktur pelayanan dasar penting karena dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas: Infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan

sarana komunikasi sehingga daerah tidak terisolasi, infrastruktur pelayanan dasar yang dapat dibangun di antara lain jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik.

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat di ukur. selain itu terdapat definisi operasional menurut Suyanto dan Salamah, mengungkapkan definisi operasional



ialah konsep atau teori yang dapat diukur (*measureable*) atau diamati (*observable*). Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan Variabel yang penulis teliti, maka dibatasi pada masalah “ Peran Kepemimpinan Lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di kantor lurah 20 Iir D II kecamatan Kemuning”.

Definisi operasional menurut Nursalam (2007:24) merupakan “suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan berikut ini.

atau mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain”.

Konsep yang digunakan dalam penelitian Peran Kepemimpinan Lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di kantor lurah 20 Iir D II kecamatan

Kemuning Kota Palembang. Di bawah ini disajikan Definisi Operasional yaitu dalam tabel





Tabel 2
Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1	Peran Kepemimpinan Lurah (Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan2. Pemberdayaan Masyarakat3. Pelayanan Masyarakat4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum5. Pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
2	Infrastruktur Pelayanan dasar Sumber: Siaran Pers Kemenko Bidang Perekonomian RI <i>No.HM.4.6/121/SET.M.EKON.2.3/10/2019 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Jalan2. Jembatan3. Air Bersih4. Sanitasi5. Lampu jalan.



Teknik Pengumpulan Data

permasalahan ini sudah di laporkan kepada RT 32 dan di teruskan ke pihak terkait.

PEMBAHASAN

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah Peran Kepemimpinan Lurah 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar.

Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Di Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

1. Pelaksana kegiatan pemerintah kelurahan

Sebagai pelaksana sebagian tugas camat lurah memiliki beberapa peran utama yaitu menjalankan dan bertanggung jawab untuk menjalankan pada pemerintahan di tingkat kelurahan termasuk mengelola administrasi, keuangan dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas penulis dapat menganalisa bahwa Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan di tingkat kelurahan sudah berjalan cukup baik, tetapi masih ada yang harus di perbaiki kordinasi antar pihak, seperti lurah , RT dan camat, sudah terjalin dengan baik namun ada kebutuhan yang meningkatkan komunikasi, dan sosial agar kebijakan agar dapat dilaksanakan dengan efektif. Keterbatasan dan pengawasan lapangan yang kurang optimal juga menjadi tantangan yang perlu di atasi agar program pembangunan dan pelayanan publik bisa lebih

maksimal.

2. Pemberdayaan masyarakat

Sebagai pemimpin di tingkat kelurahan, lurah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Lurah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan, perlu ada peningkatan komunikasi dan sosialisasi yang lebih baik agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui terlibat dalam program – program selain itu , pengawasan yang lebih mendalam dan evaluasi terhadap pelaksanaan program juga di perlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan benar – benar memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

3. Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat merupakan salah satu fungsi utama yang di jalankan oleh lurah sebagai pemimpin di tingkat kelurahan. Lurah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga mendapatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa pelayanan masyarakat sudah cukup baik namun masih ada kekurangan dari pihak kelurahan yang kurang optimal pihak kelurahan juga memerlukan memastikan petugas di pagi hari agar tidak ada penundaan



dalam pelayanan masyarakat.

4. Penyelenggaraan ketentraman ketertiban

Sebagai pemimpin di tingkat kelurahan, lurah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Fungsi ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa bahwa

upaya kelurahan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di 20 Ilir ini cukup beragam. Pendekatan yang dilakukan bersifat kolaboratif, melibatkan RT, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan dan Linmas dalam menjaga lingkungan yang tertib, namun ada peningkatan yang harus jika ada keributan atau masalah ketertiban yang terjadi di lingkungan agar kelurahan cepat merespon dan mengatasinya.

5. Pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum

Sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat kelurahan, lurah memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara sarana serta fasilitas pelayanan umum yang berada di wilayah kerjanya. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan fasilitas publik dapat berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa bahwa pengelolaan fasilitas umum di kelurahan 20 Ilir D II ini sudah cukup baik namun masih ada yang

kurang seperti peningkatan pemantauan lapangan untuk memantau kondisi fasilitas umum, tidak hanya menunggu laporan RT dan warga.

6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Sebagai pimpinan pemerintahan di tingkat kelurahan, lurah memiliki peran strategis dalam membina dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan.

Lembaga – lembaga ini merupakan mitra penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisa bahwa kelurahan aktif melibatkan lembaga – lembaga dalam setiap tahap kegiatan, Namun masih ada peningkatan kegiatan sosial di wilayah kurang terjangkau kelurahan bisa lebih intens mengadakan kegiatan sosial yang lebih melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

A. Jalan

Jalan adalah infrastruktur yang penting dalam suatu pembanguana ekonomi dan sosial suatu wilayah, jalan dapat meningkatkan aksesibilitas, jalan memungkinkan akses antara wilayah, kota dan desa sehingga meningkatkan mobilitas warga dengan adanya infrastruktur jalan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa jalan yang ada di kelurahan 20 ilir D II bahwa sering mengalami kemacetan lalu lintas, terutama pada jam sibuk seperti pagi dan sore



hari, untuk mengurangi kemacetan warga sering menggunakan jalan alternatif seperti gang – gang kecil.

Pemerintahan kelurahan bersama perangkat RT telah melakukan upaya seperti musyawarah perencanaan, pengajuan pemeliharaan jalan serta permintaan bantuan petugas lalu lintas untuk mengatur arus kendaraan di waktu padat.

B. Jembatan

Jembatan pun memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah, jembatan bisa meningkatkan konektivitas, menghubungkan wilayah, jembatan memungkinkan akses antara wilayah yang terpisah oleh sungai, jembatan juga meningkatkan aksesibilitas yang lebih mudah dan efisien ke wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa di kelurahan 20 ilir terdapat 5 jembatan yang masih berfungsi dengan baik, salah satunya adalah jembatan sekip bendung yang telah dibangun sejak 1900 an hingga kini masih menjadi penghubung penting bagi masyarakat serta jembatan memenuhi kebutuhan aksesibilitas dan konektivitas masyarakat.

Pemeliharaan jembatan dilakukan secara berkala oleh dinas PUPR melalui kegiatan serta perbaikan dan pengecatan ulang serta didukung oleh usulan dari kelurahan dalam RKPD dan Renja untuk pembangunan dan perbaikan jika diperlukan.

C. Air bersih

Air bersih memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung

pembangunan ekonomi. Dengan telah dibangunnya infrastruktur air bersih sudah tentu kesehatan masyarakat akan meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa wilayah kelurahan 20 Ilir D II memiliki 42 RT dan 11 RW yang sudah menggunakan air bersih dari PDAM sebagai sumber utama masyarakat. Proses pelaporan dan penanganan kerusakan pipa PDAM berjalan efektif dan terkoordinasi. Untuk kerusakan ringan warga seperti kebocoran kecil warga biasanya melaporkan Ketua RT yang kemudian menghubungi kepihak PDAM, sedangkan untuk kerusakan besar atau pergantian pipa pdam akan terlebih dahulu menghubungi kelurahan untuk meminta izin yang kemudian berkoordinasi kepada RT dan RW setempat.

D. Sanitasi

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, infrastruktur sanitasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi. Dengan sanitasi yang baik akan mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat seperti diare, kolera dan lain – lain, selain itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa di kelurahan 20 Ilir D II masih terdapat sanitasi yang rusak atau tidak layak, baik karena ukuran yang kecil maupun kerusakan fisik.

Hal ini telah menjadi perhatian pihak kelurahan yang



berkomitmen untuk mengajukan perbaikan dan pembangunan sanitasi baru kepada dinas PUPR ketua RT menghimbau dan megedukasi warga agar menjaga sanitasi dilingkungan masing – masing.

E. Lampu jalan

Lampu jalan merupakan peran yang penting dalam pembangunan infrastruktur berfungsi menerangi jalan pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keamanan bagi pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor dan mobil.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menganalisa bahwa lurah menghimbau kepada ketua RT dan RW untuk segera melapor apabila terdapat lampu jalan mati, rusak atau membutuhkan pemasangan yang baru Ketua RT, seperti yang dilakukan oleh ibu Aryani dari RT 32, secara langsung merespon keluhan warga dan meneruskan laporan ke pihak kelurahan, warga juga telah memahami bahwa saluran pelaporan adalah melalui RT sebagai penghubung resmi ke pihak kelurahan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang peran kepemimpinan lurah dalam membangun infrastruktur pelayanan dasar di Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang maka dapat disimpulkan bahwa pimpinan kelurahan dalam hal ini lurah 20 Ilir D II terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan kelurahan 20 Ilir D II, serta pengelolaan sarana dan fasilitas umum, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kelurahan ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. telah dilakukan dengan cukup baik. Kelurahan aktif melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM dalam berbagai program pembangunan sosial dan fisik. Namun, meskipun sudah ada upaya untuk memberdayakan masyarakat, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan warga.

Beberapa program atau kegiatan mungkin belum sepenuhnya dipahami atau diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat karena kurangnya



informasi atau sosialisasi yang maksimal. Meskipun RT/RW sudah cukup aktif dalam membantu sosialisasi, keterbatasan komunikasi atau penyampaian informasi masih menjadi kendala di beberapa wilayah.

Program pemberdayaan yang ada belum dilakukan evaluasi secara mendalam untuk mengetahui apakah program tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Komunikasi yang Lebih Efektif Kelurahan perlu meningkatkan strategi komunikasi agar lebih banyak warga yang tahu tentang program-program pemberdayaan yang ada. Pemanfaatan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, aplikasi WhatsApp, atau kegiatan pertemuan yang lebih sering dapat menjadi solusi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Agar lebih banyak warga yang terlibat, kelurahan perlu mengadakan program yang lebih inklusif, yang menjangkau kelompok masyarakat dengan latar

belakang dan kebutuhan yang berbeda. Menyusun program-program pemberdayaan yang lebih spesifik untuk kelompok tertentu, seperti ibu rumah tangga, pemuda, atau kelompok rentan lainnya. Meningkatkan akses partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar warga merasa memiliki peran dalam setiap kegiatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mahmud. (2019). *Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- David Berry. (2003). *Internet Research: Privacy, Ethics, and Digital Methods*. London: Polity Press.
- Dyah, dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, M. (2010). *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadari Nawawi. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hakiem, M. L. (2003). *Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamalik, O. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hasibuan, M. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indarti, R. (2017). *Pengantar Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika.
- Kartono, K. (2005). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*.



- Jakarta: Rajawali.
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. (2022).
Transformasi Digital Nasional.
Jakarta: Kemenko.
- Maulana, A. (2012).
Teknologi Informasi dan
Komunikasi dalam Pemerintahan.
Surabaya: Unesa Press.
- Merton, R. K. (2007). Teori
Sosiologi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyo, P., dkk. (2018).
Sistem Informasi Pemerintahan
Desa. Semarang: Unnes Press.
- Ndraha, T. (2003). Teori-teori
Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2007).
Metodologi Penelitian Ilmu
Keperawatan. Jakarta: Salemba
Medika.
- Pasolong, H. (2012). Teori
Administrasi Publik. Bandung:
Alfabeta.
- Peraturan Walikota
Palembang No. 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas Pokok
dan Fungsi, Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan Ilir Timur II
Kota Palembang.
- PP Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan.
- Rahayuningtias, A. (2014).
Analisis Efektivitas Kinerja
Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu
Administrasi, 11(2), 100–110.
- Rosadi, D., dkk. (2019). E-
Government dan Inovasi Pelayanan
Publik. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, B. (2018).
Pengantar Ilmu Komputer.
Yogyakarta: Andi.
- Soekanto, S., Sulistyowati,
R., & Budi, S. (2017). Sosiologi:
Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali
Pers.
- Suryabrata, S. (2011).
Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
- Sutrisno, E. (2014).
Manajemen Sumber Daya Manusia.
Jakarta: Kencana.
- Sutikno. (2014). Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
Bandung: Informatika.
- Siyoto, S. (2015). Dasar
Metodologi Penelitian. Ponorogo:
Literasi Nusantara.
- Uhar Suharsaputra. (2016).
Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan Tindakan. Bandung:
Refika Aditama.
- Zainal, A., et al. (2017).
Pemanfaatan Teknologi Informasi di
Sektor Publik. Jakarta: Prenadamedia
Group.